

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Suteki, Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Zainul, Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.

JURNAL

- Andy Sasongko, Andi, “Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum)”, *JOLSIC-Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 105-121.
- Bachtiar, H. Simatupang, “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 6, no. 2 (2019): 136-146.
- Fahrial, “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1(2018): 179-184.
- Husaini, Husin, M. Afdal Askar, “Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 76-87.
- Ismamudi, Nani Hartati, Sakum, “Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur”, *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, No. 2, 2023: 35-44.
- Nurinah, Eka, Sri Witurachmi, dan Jaryanto, “Peranan Bank Kredit Kecamatan Untuk Perkembangan Sektor Informal Dalam Rangka Pendalaman Materi Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi Perbankan Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi UNS”, *Jurnal Tata Arta* 1, no. 1 (2015): 117.
- Sitinjak, Y. Imman, “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no.3 (2018): 15-27.
- Sumantika, Ahsan, Adhi Prakosa, “Bank Perkreditan Rakyat, Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah”, *Jurnal Manajemen* 9, no. 1 (2019): 230-239.
- Syafaat, Musdalifah Asiyatun, Aldilla Yulia W. Sutikno, Dan Mariya Asiz, “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong”, *Jurnal Equality Before The Law* 2, no. 2 (2023): 84.
- Timbuleng, Juita Julianti, “Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Lex Privatum* II, no. 3 (Agustus-Oktober 2014): 157.

- Tulangow, Defry T, Said Aneke R., Olijj Aneke K, “Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Menangani Perkara Perdata”, *Jurnal Lex Crimen* X, no. 11 (2021): 133-141.
- Wijayanti, Nova, “Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin *Business Judgement Rule*”, *Jurnal Rechtdee* 14, no. 1 (2019): 1-18.

ARTIKEL INTERNET

- Geograf, “Pengertian Kedudukan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”, geograf.id, diakses 28 Februari 2024, [Pengertian Kedudukan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf](http://geograf.id).
- Hardja, Sudirman, “Peranan Menurut Soerjono Soekanto”, Anzdoc, Diakses pada 28 Februari 2024 melalui [Peranan menurut Soerjono Soekanto adalah: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan \(status\). Apabila seseorang melaksanakan hak dan - PDF Free Download \(adoc.pub\)](http://anzdoc.com).
- Jane, 2023, “Kredit Macet: Pengertian, Pengaturan OJK, Hingga Cara Mengatasinya”, Tips Keuangan, diakses pada 28 Februari 2024 melalui [Kredit Macet: Pengertian, Peraturan OJK, Dampak & Solusi Kredit Macet \(lancar.id\)](http://lancar.id).
- Lusianah, 2020, “Kredit Macet: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya”, Binus University, diakses pada 27 Februari 2024 melalui [Kredit Macet: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya – Accounting \(binus.ac.id\)](http://binus.ac.id).
- M. Rofiyandi, Yandi, 2022, “Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, dan Perlindungan Hukumnya”, Ekonopedia, diakses pada 28 Februari 2024 melalui, [Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, dan Perlindungan Hukumnya - Istilah Ekonomi Katadata.co.id](http://katadata.co.id).
- Pandiangan, Eko, “Jenis-Jenis Surat Kuasa Dalam Hukum Perdata”, Law Firm-EAPLawyer, diakses pada 28 Februari 2024 melalui [Jenis-Jenis Surat Kuasa Dalam Hukum Perdata - EAP Lawyer \(eap-lawyer.com\)](http://eap-lawyer.com).
- Sia, Vely, 2021, “Pengertian Kredit Dalam Akuntansi Dan Perbankan”, Mekari Jurnal Akuntansi, diakses pada 28 Februari 2024 melalui [Pengertian Kredit dalam Akuntansi dan Perbankan \(jurnal.id\)](http://jurnal.id).
- Tarihoran, Christian, 2023, “Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus”, Hukum Online, diakses pada 24 Februari 2024 melalui [Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com).
- Website Resmi PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda), “PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)”, 2024, diakses pada 7 Juli 2024 melalui [PT. BPR BKK CILACAP \(Perseroda\) – Perusahaan Simpan Pinjam Cilacap](http://pt.bprbkkcilacap.com).
- Website Resmi Kejaksaan Negeri Cilacap, 2022, “Visi Dan Misi Kejari Cilacap”, diakses pada 7 Juli 2024 melalui [Visi dan Misi – KEJARI CILACAP \(kejari-cilacap.go.id\)](http://kejari-cilacap.go.id).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6675).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992, Lembaran Lepas Setneg RI).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847).
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 65, Lembaran Lepas Setneg RI).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 67).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 28).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1375).
- Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1364).

KARYA ILMIAH

- Alfia, Gina Fitria, 2019, “Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, Hlm. 57.
- Nurmawati, Made, I Nengah S, dan Luh Gde A., 2017, “Hukum Kelembagaan Negara”, Fakultas Hukum Unud, Denpasar, Hlm. 6.

Retno Ariyanti, Indah, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”, Tesis, Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, Hlm. 38.

SUMBER LAIN

Setianto, Himawan, wawancara dengan Erna Agustin, Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap, 9 Juli 2024.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA